

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebebasan aktualisasi politik hukum Islam dan berkeyakinan kembali bergairah setelah lama terpendam akibat tekanan penguasa Orde lama dan Orde baru. Gejala menggeliatnya tuntutan politik hukum Islam semakin nampak baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, terutama setelah masuknya era reformasi tahun 1998. Momentum reformasi dijadikan motivasi oleh kelompok-kelompok ideologi agama yang berkeinginan akan tegaknya syari'at Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ekspresi atas tekanan yang dirasakan selama bertahun-tahun. Kondisi seperti itu, lebih sederhana bisa dianalogikan seperti manusia yang mulutnya ditutup rapat-rapat (dibekam) untuk tidak bisa berbicara bagaikan orang bisu, setelah dibuka terjadi ledakan merasa bebas untuk berekspresi yang tadinya politik Islam dibenci dan ditakuti, setelah reformasi dicintai dan disukai, pada gilirannya politik Islam berperan menjadi terbuka lebar bagi orang yang bersemangat menerapkan syari'at Islam melalui mekanisme dan pendekatan yang tepat. Reformasi membuka gagasan-gagasan implementasi transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional.

Hukum adalah produk politik,<sup>1</sup> pembahasan politik hukum pun cenderung mengedepankan pengaruh politik atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan dan perkembangan hukum.<sup>2</sup> Hukum adalah hasil tarik menarik berbagai kekuatan politik yang mengejawantah dalam produk hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian, medan pembuatan peraturan perundang-undangan menjadi medan perbenturan dan kepentingan-kepentingan. Badan pembuatnya akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), cet. I, 2.

<sup>2</sup> Daniel S. Lev juga berpendapat bahwa yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Lihat Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di*

kepentingan yang ada dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa negara dalam perkembangan peradaban manusia senantiasa erat hubungannya dengan agama. Hubungan keduanya mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan pemikiran manusia tentang fungsi negara dalam kehidupan pribadinya dan sekaligus, dalam hubungan negara dan agama yang dianutnya. Ada suatu masa di mana hubungan negara sangat dekat dengan agama atau bahkan menjadi negara agama. Tetapi disaat lain, terdapat pula masa-masa agama mengalami ketegangan dengan politik.<sup>4</sup>

Pandangan *teokratis*,<sup>5</sup> menjalankan hukum apa yang dilakukan manusia pada masyarakat secara luas, baik itu menyangkut ekonomi, politik, maupun budaya, harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dalam pemahaman ini, kekuasaan adalah milik Tuhan. Singkatnya, agama adalah panglima.<sup>6</sup> Dalam arti bahwa agama harus menjadi dasar negara. Tidak ada perbedaan antara kekuasaan agama dengan kekuasaan politik. Semua hukum harus bersumber dari agama, hukum agama adalah hukum negara.<sup>7</sup> Puncak hubungan antara negara dan agama terjadi ketika konsep Kedaulatan Tuhan dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam diri Raja. Kedaulatan Tuhan (*theocracy*) dan kedaulatan Raja berhimpit satu sama lain sehingga kekuasaan raja adalah absolut yang membelenggu peradaban manusia pada abad pertengahan. Kondisi tersebut melahirkan gerakan sekularisme yang berusaha memisahkan institusi negara dari institusi agama, antara negara dan gereja.<sup>8</sup> Namun upaya sekularisasi tersebut hingga saat ini masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan krusial

*Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, (Jakarta : LP3ES, 1990), xii.

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), 126.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, makalah dengan judul *Dimensi Historis-Epistemologis bidang Keilmuan Hukum Islam dan Pranata Sosial serta Orientasi Pengembangannya di IAIN/STAIN*, Makalah dipresentasikan dalam Semiloka Pembidangan Keilmuan Agama Islam, Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat (LKIM), STAIN Mataram, 12-13 September 2003.

<sup>5</sup> Teokratis berasal dari Yunani yang berarti Pemerintahan Tuhan. Lihat O'Collins Gerald dan Edward Farrugi, *Kamus Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 314.

<sup>6</sup> Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 25.

<sup>7</sup> Gunaryo, *Pergumulan Politik*, 26-27

hubungan negara dan agama.

Gerakan sekularisasi di Eropa telah muncul bersamaan dengan masa pencerahan (*renaissance*). Namun sampai saat ini pemisahan urusan agama dan persoalan-persoalan kenegaraan secara empiris tidak benar-benar dapat dipisahkan. Diduga kuat sebab utamanya para pengelola negara adalah manusia biasa yang terikat pada beberapa norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma agama. Misalnya, negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis dan Belanda adalah negara yang dipermaklumkan sebagai negara sekuler<sup>9</sup>, tetapi banyak kasus menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam urusan keagamaan terus berlangsung dalam sejarah.

Kebijakan pemerintahan modern dan negara di lain pihak, dalam sejarah juga tidak dapat melepaskan sama sekali keterikatan dan intervensinya ke dalam urusan-urusan keagamaan. Bahkan dalam masyarakat Amerika sekalipun yang diklaim sebagai masyarakat paling bebas dan paling demokratis, justru kegiatan kenegaraannya dapat dianggap paling dekat dan paling mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianut penduduknya.<sup>10</sup>

Umat Islam memiliki tujuan dan cita-cita hidup terwujudnya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan tujuan ini Allah memberi pedoman kepada umat Islam dalam bentuk al-Qur'an dan al-Hadits. Hanya terdapat perbedaan bentuk pedoman antara persoalan keakhiratan dan persoalan keduniaan. Dalam hal keakhiratan, yang meliputi keimanan dan ibadah kepada Allah, penjelasan itu diberikan secara rinci. Sedangkan dalam hal keduniaan, yang meliputi norma-norma dan etika hubungan antara sesama manusia dan dengan alam, penjelasan itu diberikan secara garis besar atau prinsip-prinsip umum saja. Perbedaan disebabkan pada dasarnya hal yang pertama tidak mengalami

---

<sup>8</sup> Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat dan Etika* (Jakarta; Premadi, 2007), 34.

<sup>9</sup> Sejumlah orang (Greeley, 1982 ; Bouma, 1983 ; Wilson, 1979; Hay dan Moris, 1985), mengatakan bahwa klaim sekulerisme adalah *mitos*. Meskipun boleh saja orang tidak lagi pergi ke gereja, namun perilaku mereka pada banyak kasus selalu menampilkan warna-warna religius. Mereka ini menolak anggapan bahwa telah terjadi sekulerisme secara komplit di dalam masyarakat, Mereka sebaliknya berargumentasi bahwa yang terjadi adalah perubahan sikap religius, bukan peninggalan agama.

<sup>10</sup> Tradisi sidang Kongres AS ialah dibuka dengan doa yang dipimpin oleh tokoh agama secara

perubahan, sedangkan hal yang kedua mengalami perubahan sesuai dengan watak manusia yang selalu berkembang.

Secara umum terdapat tiga problem utama yang dihadapi umat Islam di dunia dewasa ini, yakni (1) tingkat pendidikan dan ekonomi mayoritas umat yang masih rendah, (2) kecenderungan mayoritas pemerintah di negara-negara muslim yang bersikap otoriter, dan (3) sistem mayoritas negara muslim yang belum sesuai dengan Islam dan sekaligus nilai-nilai kemanusiaan<sup>11</sup>. Oleh karenanya, maka muncullah gerakan-gerakan perjuangan aspirasi Islam untuk mengatasi ketiga problem utama ini.

Aspirasi terhadap problem pertama dan kedua bersifat umum (universal), dalam arti diperjuangkan pula oleh umat non Islam. Sedangkan problem ketiga lebih bersifat khusus (partikular) bagi umat Islam. Atas dasar problem ini, maka perjuangan aspirasi umat Islam dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yakni perjuangan aspirasi yang bersifat umum, yang bisa disebut ‘Humanisasi’, dan perjuangan aspirasi yang bersifat khusus untuk umat Islam, yang bisa disebut ‘Islamisasi’.

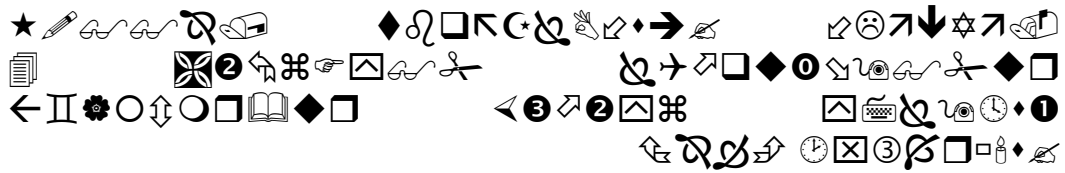
Islam adalah agama yang dianut secara mayoritas oleh warga negara Indonesia. Di dalamnya terintegralkan nilai-nilai abstrak, yang ditujukan sebagai penuntun manusia menjalani hidupnya menuju keselamatan di dunia dan di akhirat.<sup>12</sup> Politik Hukum Islam di Indonesia, terakomodasi merupakan kebutuhan bersama. Hal ini sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa:4:59.



bergantian dari Kristen, Yahudi, dan Islam.

<sup>11</sup> Masykuri Abdillah, *Aspirasi Umat: Antara Islamisasi dan Humanisasi, dalam Syari'at Islam Yes Syari'at Islam No*, Kurniawan Zein Sarifuddin HA (ed.) (Jakarta Paramadina, 2001), 15.

<sup>12</sup> Effendi Choirie dan Uday M. Abdurrahman, *Syari'at Islam Yes Syari'at Islam No* (Jakarta : Paramadina, 2001), 90.



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>13</sup>.



“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>14</sup>

Hadits Rasulullah Saw. riwayat Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan, telah menceritakan kepada kami Abdullah, dari Yunur, dari az-Zuhri, telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdirrahman, sesungguhnya ia telah mendengar Aba Hurairah r.a. beliau berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: barang siapa yang taat kepadaku maka sungguh ia taat kepada Allah, dan barang siapa

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Madinah al-Munawarah: al-Mushaf as-Syarif, 1418 H, 128.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, 217.

yang durhaka kepadaku, maka sungguh ia durhaka kepada Allah, dan barang siapa yang taat kepada pemerintah, maka sungguh ia taat kepadaku, dan barang siapa yang durhaka kepada pemerintah, maka sungguh ia durhaka kepadaku. (HR. Bukhari)”<sup>15</sup>.

Oleh karena itu, hak asasi manusia dan kebebasan mereka tunduk pada hukum, dan prosedur demokrasi norma hukum dianggap sebagai norma kedua setelah al-Qur'an<sup>16</sup>. Ini berarti bahwa hukum diciptakan oleh Tuhan bersifat absolut mengikat kehidupan manusia. Setiap muslim meyakini validitas dan akurasi hukum Tuhan yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Hukum Tuhan atau syari'at Islam bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Kaum muslimin meyakini bahwa Tuhan telah menjamin dalam al-Qur'an surat al-Hijr 15:9<sup>17</sup>, baik menyangkut keabadian dan keasliannya. Ia akan tetap eksis di manapun dan sampai kapanpun selama dunia ini masih memancarkan sinar kehidupan. Di dalam perspektif sejarah Rasulullah Saw., hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Ada dua aktivitas yang sangat penting yang dilakukannya setiba di Madinah, yaitu mendirikan masjid Quba dan *city-state* di Madinah.<sup>18</sup> Dua peristiwa itu membuktikan bahwa nabi Muhammad Saw., telah melaksanakan dua macam doktrin Islam yang pokok yaitu hubungan manusia dengan Allah Swt., dan hubungan manusia dengan manusia (*hablumminallah wa hablumminannas*).

Adapun dikasus pemberlakuan syari'at Islam sebenarnya adalah masalah klasik yang sudah ada sejak nabi Muhammad Saw., menjadi kepala negara di

---

<sup>15</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismai bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah Bukhari al-Ja'fii, Juz IV, Daarul Fikr, 104

<sup>16</sup> Antony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Terjemah oleh (Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka, 2006), 611.

<sup>17</sup> Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al- Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.”

<sup>18</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara dan Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 157. Lihat Pula Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta :Pustaka Jaya dan Tintamas, 1982), 218.

Madinah.<sup>19</sup> Kapasitasnya sebagai kepala negara dapat dibuktikan dengan tugas-tugas yang beliau lakukan sebagaimana termuat dalam berbagai literature.<sup>20</sup> Nabi Muhammad Saw., membuat aturan-aturan dalam bentuk tertulis untuk mempersatukan penduduk Madinah yang bercorak heterogen untuk mencegah timbulnya konflik-konflik di antara mereka agar terjamin ketertiban intern maupun ekstern.

Perjuangan nabi Muhammad Saw., ini kemudian dilanjutkan oleh *al-Khulafa al-Rasyidin*.<sup>21</sup> Model pemerintahan yang berlandaskan syari'at Islam di Madinah memberikan inspirasi bagi negara-negara di dunia terutama di Asia dan Afrika untuk mengadopsi syari'at Islam dalam konstitusinya, seperti Tunisia, Maroko.<sup>22</sup> Aljazair, Pakistan, Sudan dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Wacana Islam dan negara merupakan wacana yang diduga kuat tidak pernah mengalami kata sepakat untuk menyatukan negara dan agama. Pro-kontra seputar pemberlakuan syari'at Islam dalam ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pertarungan wacana yang belum pernah mengenal kesepakatan di kalangan pemikir-pemikir Islam. Penolakan sementara orang terhadap gagasan pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia, didorong oleh anggapan sebagian para cendekiawan muslim yang tidak sepakat dengan formalisasi syari'at Islam. Mereka memandang bahwa persoalan-persoalan normatif keagamaan (*syari'ah*) berada di luar konteks ketatanegaraan. Persoalan agama adalah persoalan pribadi (*privacy*). Mereka yang menggagas pemberlakuan syari'at Islam memiliki tujuan

## BANDUNG

<sup>19</sup> Deddy Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan Modern Dalam Islam* (Bandung : Pustaka ATTADBIR, 2006 ), 225-226.

<sup>20</sup> Lihat: Wael B. Halaq; (2000;10), Yusuf al-Qardawi; (1990; 34) M. Syahrur dalam *Metodologi fiqh Islam Kontemporer*, terjemahan oleh Sahiron Samsudin (Jogjakarta: 2004) dalam *pembahasan Kepemimpinan dalam Islam*, 441.

<sup>21</sup> Perjalanan Khalifah I Abu Bakar As-Siddik yang mengirim tentaranya untuk menguasai Syiria, dia berpesan kepada para pemimpinnya untuk selalu berpegang teguh pada hukum Allah. Lihat, Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terjemahan oleh E Kusdaningrat Judul asli *A History Of Islamic Legal Theories* (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), 10.

<sup>22</sup> Sejarah Pembaruan Islam di Maroko telah dimulai dengan kebangkitan gerakan *Al- Murabitun* abad ke -11 pada masa Sultan Sidi Muhammad ibn Abdullah Berkuasa dari 1757 hingga 1790. Pada masa itu pemerintahannya begitu keras untuk menerapkan hukum Islam secara ketat dan memerangi bid'ah. Lihat Adjid Tohir, *Studi Kawasan Timur Tengah* (Jakarta; Rajawali Pers, 2009), 302.

<sup>23</sup> Tohir, *Studi Kawasan*, 309

untuk mengawal negara agar tidak terjebak oleh sistem sekuler yang dianggap menjauhkan sistem negara dari norma agama.

Di negara Indonesia sendiri, Islam dipahami dalam dua sisi. *Pertama*, bahwa Islam bersifat holistik sebagaimana dipahami oleh pemikir Islam. Ini berarti bahwa hubungan Islam dengan segala aspek kehidupan harus dalam bentuknya yang legal dan formal. *Kedua*, bahwa Islam tidak seharusnya diposisikan secara *antagonistik* dalam hubungannya dengan negara sebagaimana anggapan para pemikir Islam modern.<sup>24</sup>

Berbicara tentang pemberlakuan syari'at dalam suatu negara, maka perlu ada pembatasan yang tegas tentang syari'at mana yang dimaksud. Syari'at dalam pengertian pertama mencakup bidang yang lebih luas dari apa yang dimaksud hukum dalam pengertian modern. Syari'at dalam pengertian yang kedua mempunyai teks yang sangat terbatas, sedangkan permasalahan manusia begitu banyak. Adapun syari'at dalam pengertian yang ketiga sebagai fiqh, selain terdiri berbagai interpretasi atau mazhab yang lebih luas dari cakupan hukum dalam konteks negara, merupakan pandangan dari masa dan kondisi tertentu yang mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan kondisi kekinian umat. Karena itu, fiqh memerlukan penataan kembali sehingga sesuai betul dengan hukum zaman sekarang (fiqh kontemporer).

Meski bukan merupakan ide baru, tuntutan pemberlakuan syari'at Islam secara formal masih tetap menjadi agenda penting banyak organisasi dan tokoh muslim termasuk di daerah-daerah tertentu.<sup>25</sup> Terlebih lagi dewasa ini di Negara Indonesia yang tengah dilanda krisis. Pemberlakuan syari'at Islam menjadi satu tawaran alternatif dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Kairul Bayan, 2004), 27.

<sup>25</sup> Daerah yang mendapatkan hak istimewa untuk memberlakukan Syari'at Islam adalah Nangro Aceh Darussalam (NAD) dengan diberlakukannya UU 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi NAD, dalam pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Qanun Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang di wilayah Propinsi NAD dalam penyelenggaraan otonomi khusus.

<sup>26</sup> Salah satu solusi mengatasi permasalahan ekonomi misalnya Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah



Era reformasi 1998, upaya gerakan pemberlakuan syari'at Islam dengan tujuan diformalkan dalam bentuk sebuah konstitusi negara tidak hanya dilakukan melalui wacana dan aksi lapangan, tapi juga melalui jalur konstitusi. Lebih dari itu, aspirasi yang sama juga berlangsung di tingkat lokal. Syari'at Islam berkembang kuat di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti: Nanggroe Aceh Darussalam (NAD),<sup>27</sup> di Cianjur<sup>28</sup> Jawa Barat, dan di Bulukumba<sup>29</sup> Sulawesi Selatan termasuk di Kabupaten Sukabumi.<sup>30</sup>

Syari'at sebagai ajaran yang memuat sejumlah nilai keadilan, kedamaian, keadaban dan kesetaraan, menurut kalangan yang kontra terhadap pemberlakuan syari'at Islam tatkala disimpulkan dan diformalisasikan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai ideal. Misalnya, formalisasi syari'at Islam diidentikan dengan perubahan papan nama, petunjuk jalan, institusi lembaga, tempat-tempat tertentu dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab.

Pada tataran paradigmatis pemberlakuan syari'at Islam tidak jadi persoalan, karena sepanjang sejarah peradaban Islam kekayaan paradigmatis menjadi *khazanah* yang patut dibanggakan. Munculnya berbagai mazhab dan sekte menunjukkan keragaman *khazanah* Islam. Namun yang menjadi persoalan apabila khazanah dipahami sebagai "*bahan baku*" yang hanya dituntut untuk dilaksanakan tanpa melalui kontekstualisasi dengan persoalan kekinian.

Gejala pemberlakuan syari'at Islam dengan cara diformalkan di daerah-daerah dalam bentuk perda-perda syari'at lebih didasarkan atas reproduksi fiqh dan mazhab tertentu dengan dua kecenderungan umum. *Pertama*, syari'at formalis, yaitu kecenderungan untuk menjadikan syari'at sebagai hukum positif yang wajib diterapkan di bawah otoritas politik (negara). Bagi kalangan yang memiliki kecenderungan syari'at formalis tidak berfikir tentang syari'at yang seperti apa dan bagaimana yang sesungguhnya. Formalisasi syari'at lebih

---

<sup>27</sup> Di Aceh diberlakukan Qonun Sebagai aturan dalam menjalankan Syari'at Islam bagi warga muslim di NAD.

<sup>28</sup> Di daerah Cianjur upaya pemberlakuan Syari'at Islam dilakukan dengan pengesahan Perda Nomor 12 tentang Gerbang Marhamah tahun 2001.

<sup>29</sup> Perda Minuman Keras serta Zakat, Infak, dan Sedekah.

<sup>30</sup> Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 114 / 2003 tanggal 10 Maret 2003 tentang pembentukan Badan Pengkajian dan Pengembangan Syari'at Islam (BPPSI)

dipahami sebagai tanggungjawab negara, bukan tanggungjawab per-individu yang mempunyai tanggungjawab personal dengan Tuhan (*habblum minallah*). Karena itu, penggagas syari'at formalis membutuhkan hukum yang dapat dijadikan pedoman negara dalam mewajibkan pemberlakuan syari'at bagi komunitas muslim. Di sini ulama dan negara mempunyai otoritas yang sangat dominan untuk menentukan model syari'at yang akan diberlakukan. *Kedua*, syari'at simbolik, yaitu kecenderungan untuk menggunakan simbol-simbol kebudayaan masyarakat Arab sebagai bagian terpenting dari formalisasi syari'at. Misalnya menggunakan bahasa Arab pada tempat-tempat tertentu supaya diidentikan dengan nuansa Islami, berpakaian layaknya dipakai oleh orang Arab, memelihara janggut yang lebat, menghitamkan keningnya dan apa-apa yang menjadi kultur masyarakat Arab diboyong serta merta dan dijadikan potret terbaik dari formalisasi syari'at.<sup>31</sup>

Formalisasi syari'at Islam dalam pemahaman lain, mengandung arti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara sesungguhnya bukan berarti penegakan negara Islam. formalisasi syari'at Islam adalah upaya penerapan ajaran Islam secara *kaffah* (sempurna) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap muslim.<sup>32</sup>

Banyaknya perda-perda yang diasumsikan sebagai upaya formalisasi syari'at Islam, seperti Perda Kabupaten Sukabumi No. 11/2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol, Perda No. 12/2005 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Sukabumi, Perda Diniyah di Serang.<sup>33</sup> Perda Anti Miras dan Prostitusi di Kota Tangerang,<sup>34</sup> Lebak,<sup>35</sup> Cianjur,<sup>36</sup> dan di tempat-tempat lainnya, menunjukkan bahwa ada pengintegrasian syari'at Islam sehingga bisa dijadikan alternatif pilihan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tataran kultural, timbul kecenderungan umat untuk lebih mempertahankan nilai-

---

<sup>31</sup> Zuhairi Misrawi, *Deformalisasi Syariah*, Jurnal. Taswirul Afkar, Edisi 12 (Jakarta: Penerbit Lakpesdam Kerjasama TAF, 2003), 25.

<sup>32</sup> A. Syafi'i Maarif, dkk, *Syari'at Islam Yes Syari'at Islam No* (Jakarta: Paramadina, 2001), 4.

<sup>33</sup> Perda Nomor 12 tahun 2005 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah

<sup>34</sup> Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran dan Prostitusi

<sup>35</sup> Perda No. 11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Lebak.

<sup>36</sup> Keputusan Bupati Cianjur Nomor 451/2712/ASDA.I/2001, yang melahirkan Gerbang Marhamah (Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah).

nilai Islami yang sudah terpelihara untuk meningkatkan kesalehan individu dan sosial.

Keberadaan perda-perda tersebut membawa nilai-nilai syari'at Islam, sebenarnya bertujuan sebagai upaya sebagian kalangan masyarakat Islam tertentu untuk memformalkan syari'at Islam dalam sistem hukum nasional. Ini artinya, selama pasal-pasal syari'ah belum menjadi bagian dari hukum positif (UU atau Perda), maka ia belum bersifat objektif (dalam pengertian baik buat kepentingan umat secara nasional). Dengan objektifikasi, syari'at Islam akan menjadi sebuah sistem hukum yang tidak hanya bermanfaat bagi sekelompok orang atau bagi umat Islam saja tetapi bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia dengan tidak melihat agama apapun dari mereka.<sup>37</sup>

Menurut buku-buku sejarah, penyebaran agama Islam di Sukabumi semakin berkembang setelah Pajajaran jatuh. Sukabumi, pada awalnya bagian dari Kabupaten Cianjur pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, yang merupakan bagian dari Keresidenan Priangan (*Residentie Preanger Regents Chappen*). Di tahun 1776, Bupati Cianjur ke enam Raden Nuh membentuk sebuah Kepatihan bernama Kepatihan Tjikole yang terdiri dari beberapa distrik yaitu distrik Goenoeng Parang, distrik Tjimahi, distrik Tjiheulang, distrik Tjitjoeroeg, distrik Jampang Tengah, dan distrik Jampang Kulon dengan pusat pemerintahan di Tjikole (sekarang bagian dari Kota Sukabumi).

Pada tanggal 13 Januari 1815 M, Kepatihan Tjikole berganti nama menjadi Kepatihan Soekaboemi. Nama Soekaboemi diusulkan oleh Dr. Andries de Wilde, seorang ahli bedah yang mempunyai usaha perkebunan kopi dan teh di daerah Soekaboemi. Asal nama "Soekaboemi" berasal dari bahasa Sansekerta, *Soeka* berarti kesenangan, kebahagiaan, kesukaan, dan *Bhoemi* yang berarti bumi, tanah. Jadi, "Soekaboemi" memiliki arti "tanah yang disukai." Bertepatan dengan berlakunya Undang-undang Agraria pada 1870, maka pada 10 September 1870 diangkat seorang Patih dan seorang asisten Residen untuk memerintah Soekaboemi. Daerah Soekaboemi naik statusnya menjadi *afdeeling*. Wilayah ini

---

<sup>37</sup> Lutfi Assaukanie, dkk, *Syari'at Islam Yes Syari'at Islam No* (Jakarta: Paramadina, 2001), 157.

kemudian dibagi menjadi sejumlah distrik seperti Distrik Gunung Parang, Distrik Cimahi, Distrik Cicurug, Distrik Ciheulang, Distrik Pelabuhan Ratu, Distrik Jampang Tengah dan Distrik Jampang Kulon. Para Patih yang memerintah Soekaboemi semasa *afdeeling* antara lain Patih Aria Wangsa Reja yang diangkat berdasarkan Statblad No. 121 Tahun 1870 tertanggal 10 September 1870. Selanjutnya yang menjadi patih Soekaboemi adalah Aria Kartareja, Patih Aria Kartakusumah, Patih Suryanatalegawa, Patih Suryanapamengkas (menjabat pada 8 Oktober 1905), Patih Suryaningrat dan Patih Suryanatabrata 1913-1921.

Pada 1 Juni 1921 status Soekaboemi naik lagi menjadi Kabupaten dengan Patih Suryanatabrata menjadi Bupati pertama hingga 1930. Sehingga secara hukum tata negara hari jadi Kabupaten Sukabumi itu pada tanggal 1 Juni. Bupati kedua adalah Bupati RTA Surya Danoeningrat yang merupakan Bupati terakhir masa Hindia Belanda hingga 1942. Pada masa pendudukan Jepang RTA Surya Danoeningrat ini tetap menjabat menjadi Bupati sampai masa kemerdekaan.<sup>38</sup>

Kabupaten Sukabumi seperti juga wilayah-wilayah lain di daerah Jawa Barat merupakan daerah mayoritas Islam penduduknya, dan mempunyai beberapa pondok pesantren sebagai tempat mendidik santri untuk mengembangkan ajaran agama Islam, sebagai lembaga pendidikan tradisional keagamaan Islam yang sudah cukup lama dan banyak melahirkan tokoh pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tersebar di berbagai daerah Sukabumi.

Agama Islam merupakan elemen paling penting yang memberi bentuk kehidupan mayoritas penduduk daerah ini. Keinformasian Islam ke Sukabumi khususnya, memungkinkan adanya akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal yang telah menjadi adat kebiasaan pada masa-masa sebelumnya dan sebagai salah satu wujud interaksi timbal balik antara Islam dan budaya lokal itu, banyak sekali adat Sunda yang kini tinggal kulitnya, sedangkan isinya telah banyak “di Islamkan.”

---

<sup>38</sup> Sjafari, *Sejarah Kota dan Kabupaten*. [http://www.kompasiana.com/jurnalgemini/sejarah-kota-dan-kabupaten-sukabumi-hingga-1942-kisah-kopi-wisata-dan-gerakan-politik-Islam\\_55111044a333117b39ba9163](http://www.kompasiana.com/jurnalgemini/sejarah-kota-dan-kabupaten-sukabumi-hingga-1942-kisah-kopi-wisata-dan-gerakan-politik-Islam_55111044a333117b39ba9163) (diakses 17 Februari 2016)

Gagasan pemberlakuan syari'at Islam dimulai dari adanya pengakuan masyarakat Kabupaten Sukabumi itu sendiri untuk mengakui bahwa, apabila masyarakat Kabupaten Sukabumi berbicara tentang pemberlakuan syari'at Islam di Kabupaten Sukabumi maka wacana yang dibangun adalah pelaksanaan hukum Islam sebagai hukum positif di suatu daerah tertentu (*Law in Concreto*).

Kabupaten Sukabumi adalah salah satu Kabupaten yang gencar melancarkan politik dan penerapan hukum Islam di tingkat lokal. Adapun langkah-langkah persiapan ke arah Penegakan Syari'at Islam (PSI) ditempuh melalui jalur konstitusi pemerintahan daerah, yang terlebih dahulu membuat Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) merupakan lembaga pendukung yang akan melahirkan berbagai produk hasil pemikiran mengenai berbagai pemikiran alternatif hukum Islam yang akan diaplikasikan oleh Intansi/dinas terkait, dan dipertegas dengan keluarnya keputusan bupati Sukabumi Nomor 114 Tanggal 10 Maret 2003, Tentang Pembentukan Badan Pengkajian dan Pengembangan Syari'at Islam (BPPSI).

Upaya Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Sukabumi dilaksanakan merupakan penjabaran dari *Fiqh al-Akbar/Syari'ah*, bagian dari syari'ah adalah *khuluqiyah*. Jadi pelaksanaan syari'at Islam di Kabupaten Sukabumi adalah melalui gerakan akhlak. Di antaranya dengan dikeluarkan Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2008 Tentang Standar Program Pengembangan Diri Bidang Pembiasaan Akhlak Mulia di Sekolah dan Madrasah. Peraturan Bupati ini mengandung nilai-nilai hukum Islam yang ditransformasikan ke dalam hukum positif. Nilai-nilai tersebut berupa: *Pertama*, berbakti kepada orang tua dan guru; *Kedua*, berbusana muslim pada setiap aktivitas pembelajaran, masuk kelas diawali dan diakhiri dengan salam, berdo'a diawal dan diakhir pelajaran serta mushafahah kepada guru sebelum keluar dari kelas; *Ketiga*, memelihara kebersihan diri dan lingkungan; *Keempat*, sebelum memulai pelajaran terutama diawali dengan membaca al-Qur'an bersama sekurang-kurangnya 15 menit dan setiap mata pelajaran diawali dengan membaca ayat/hadits terkait; *Kelima*, di setiap jam istirahat diawali dengan shalat dhuha bersama; *Keenam*, melaksanakan shalat dhuhur berjama'ah dan dzikir, bagi sekolah yang belajarnya siang atau sore maka berjama'ahnya

shalat ashar, maghrib dan isya; *Ketujuh*, Melaksanakan *ta'lim* sekolah oleh unsur KUA dan ulama setempat minimal 1 kali dalam sebulan dan pelaksanaan *ta'lim* setelah pelaksanaan berjama'ah shalat shubuh; *Kedelapan*, membentuk Unit Pengumpulan Zakat/UPZ di setiap satuan pendidikan dan melakukan pendidikan infaq sejak dini; *Kesembilan*, *qiyamul lail* sekurang-kurangnya seminggu sekali bergilir sesuai kondisi dan membentuk pramuka *iqomah* (Ikatan Penggerak *Qoryah Mubarakah*); dan *Kesepuluh*, pembiasaan shaum-shaum sunat dan rutinitas budaya Islami lainnya.<sup>39</sup>

Produk-produk politik hukum di Kabupaten Sukabumi tersebut memperlihatkan dinamika politik lokal, yaitu adanya tuntutan untuk Penegakan Syariat Islam di satu pihak dan dukungan pemerintah di pihak lain. Kebijakan atau produk lainnya merupakan hasil dari seluruh mekanisme politik di tingkat lokal dan dapat dijadikan tolok ukur bagi dinamika politik di tingkat lokal.

## **B. Perumusan Masalah**

Hukum Islam merupakan salah satu dari sumber pembentukan hukum nasional, maka transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional semakin kuat setelah era reformasi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Masyarakat Kabupaten Sukabumi gencar melaksanakan transformasi norma syari'at Islam ke dalam peraturan daerah. Mengingat faktor pendorong disebabkan oleh semangat era reformasi, maka dalam mekanisme dan model politik hukum Islam masih lemah, sehingga prospek hukum belum tercapai optimal. Dengan demikian, problem akademis disertasi ini adalah politik hukum Islam di tingkat lokal.

Bertolak dari rumusan masalah tersebut, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor pendorong Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana mekanisme politik dalam Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana masalah dan solusi Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Sukabumi?

---

<sup>39</sup> Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2008 Tentang Standar Program Pengembangan Diri Bidang

4. Bagaimana model Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Sukabumi?
5. Bagaimana prospek dan pengembangan Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Sukabumi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pertanyaan penelitian sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Faktor yang mendorong adanya Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Sukabumi.
- b. Mekanisme politik dalam Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Sukabumi.
- c. Masalah dan solusi Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Sukabumi.
- d. Model Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Sukabumi.
- e. Prospek dan pengembangan Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Sukabumi.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dalam arti:

- a. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut mengenai Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Sukabumi dengan perspektif yang berbeda;
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perumusan dan kebijakan tentang politik hukum Islam di tingkat lokal Kabupaten Sukabumi:
  - 1) Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian lebih lanjut untuk merumuskan kajian politik hukum Islam di tingkat lokal;
  - 2) Bagi pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk perumusan kebijakan lebih lanjut

dalam merespon aspirasi masyarakat untuk mentransformasikan norma-norma syari'at Islam;

- 3) Bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan norma-norma syari'at Islam.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Pengertian Syari'at Islam

Syari'at secara bahasa (*etimologi*) tentunya harus dirujuk ke dalam bahasa al-Qur'an bukan ke dalam bahasa lokal yang memunculkan penafsiran *absurd*.<sup>40</sup>

Kata atau kalimat yang mempunyai akar kata *syara'a* dapat kita temukan di dalam al-Qur'an sebanyak lima kali.<sup>41</sup> Secara bahasa atau literal (*lughawi*), syari'ah atau *syar'i* berasal dari kata *syari'a*, berarti "jalan menuju air". Artinya, sebuah jalan menuju ke sesuatu yang benar-benar merupakan sumber kehidupan (air). Di dalam penggunaan keagamaan, syari'ah berarti "jalan besar untuk kehidupan yang baik" (*the highway of good life*) yakni, nilai-nilai agama yang dapat memberikan petunjuk bagi setiap manusia. Pengertian secara literal ini juga sesuai dengan apa yang memang terkandung dalam makna serta visi dan misi syari'ah itu sendiri. Sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Maidah 5: 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨)

“Dan Kami telah turunkan kepadamu (Muhammad) al-Qur'an dengan

<sup>40</sup> Hidayat Nur Wahid, *Penerapan Syari'at-Islam di Indonesia* (Jakarta: Globalmedia, 2004), 140.

<sup>41</sup> Abd al-Baqi, *al-Mujam*, 378-9.



membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah informasing kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.<sup>42</sup>

Secara umum, syari'ah berarti "cara hidup Islami yang ditetapkan berdasarkan wahyu Ilahi". Jadi, ia tidak hanya mencakup persoalan-persoalan legal dan jurisprudensi, tapi juga praktik-praktik ibadah ritual, teologi, etik dan juga kesehatan personal dan tatakrama yang baik.<sup>43</sup>

Mahmud Syaltut membagi ajaran Islam menjadi dua bagian besar: aqidah dan syari'ah. Sedangkan sebagian ulama yang lain membagi ajaran Islam menjadi tiga aspek, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak.<sup>44</sup> Aqidah adalah pokok-pokok keyakinan; syari'ah adalah tuntunan mengenai tata peraturan kehidupan praktis dan; akhlak adalah tuntunan dan bimbingan tata cara yang harus ditempuh agar seseorang menjadi mulia dan luhur, melakukan hubungan yang baik dengan Allah dan manusia (*hablum minallah wa hablum minannas*). Islam dalam pengertian ini dapat diartikan sebagai totalitas ajaran yang menyangkut hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia.

Al-Qur'an diturunkan secara bertahap dalam dua periode, Makkah dan Madinah. Keseluruhannya memerlukan waktu dua puluh dua tahun dua bulan dan dua puluh dua hari. Kaitan ini muncul istilah tasyri' (legislasi atau pengundangan). Secara teknis, syari'ah adalah produk atau materi hukumnya, tasyri' adalah pengundangnya, dan subyeknya disebut syari' (Allah). Dari sinilah barangkali Abdul Wahab Khallaf "mereduksi" pengertian syari'ah sebagai titah (*khitab*) Allah

<sup>42</sup> Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 168.

<sup>43</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Al-Qur'an, Syari'ah, dan HAM: Kini dan di Masa Depan* (Oktober-Desember 1993: Islamika), No. 2, 112.

<sup>44</sup> Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (NAD: Dinas Syari'at Islam, 2006), 9.

yang berhubungan dengan perbuatan manusia.<sup>45</sup> Manusia dalam pengertian ini adalah muslim, dewasa, berakal sehat baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara. Sejalan dengan hal ini, maka setiap orang yang menyatakan dirinya muslim masuk dalam katagori wajib menjalankan syari'at yang ditetapkan oleh Allah Swt., secara *kaffah*.

Adapun Islam berasal dari akar kata *salima*, secara etimologi kata *salima* berarti selamat, damai dan sejahtera. Sedangkan secara terminologi Islam berarti penyerahan atau penundukkan diri secara total kepada Allah Swt., esensi makna Islam adalah membuat perdamaian dengan Tuhan dan manusia. Damai dengan Tuhan berarti tunduk dan patuh kepada-Nya, dan damai dengan manusia berarti meninggalkan perbuatan buruk dan menyakitkan (merugikan) orang lain, serta berbuat baik kepada orang lain. Orang yang beragama Islam akan menjalin komunikasi intens dan memotivasi dirinya untuk tunduk dan taat terhadap segala aturan-aturan yang dibuat-Nya, baik aturan duniawi maupun *ukhrawi*, tanpa *reserve* (batasan).

Adapun syari'at Islam secara umum adalah keseluruhan teks al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai ketentuan Allah yang seharusnya menjadi pegangan hidup manusia agar damai dengan Tuhan dan damai dengan manusia. Syari'at Islam merupakan syari'at yang komplit dan mencakup segala permasalahan, baik individu, masyarakat maupun negara. Ia mengatur masalah pribadi, mu'amalat, dan seluruh permasalahan yang berkaitan dengan manusia. Syari'at Islam tidak bersifat temporer, ia abadi menjangkau setiap zaman untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Menurut Yusuf al-Qardhawi syari'at Islam itu berbeda dengan undang-undang produk manusia (*Qanun Wadh'i*). Perbedaan syari'at dan qanun adalah, bahwa syari'at Islam tercipta dari Allah Yang Maha Kuasa, dengan kuasa-Nya, maka Ia mengetahui hal-hal yang gaib, kuasa untuk menciptakan *nash-nash* yang kekal sepanjang masa untuk manusia. Sedangkan *qanun* adalah produk manusia, ia dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya temporer.

Berbeda dengan pendapat Fazlur Rahman, syari'ah adalah nilai-nilai agama

---

<sup>45</sup> Rafiq, *Pembaharuan Hukum*, 16.

yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna kongkrit dalam kehidupan yang bertujuan untuk mengarahkan hidup manusia dalam kebaikan.<sup>46</sup> Oleh karena itu, sumber syari'ah adalah al-Qur'an, al-Hadits, ilmu fiqh, ilmu kalam dan berbagai ijtihad, maka syari'ah tidak hanya bisa dipahami sebagai aturan berdimensi tunggal, tetapi ia lebih merupakan pesan keagamaan yang senantiasa berkembang dan membutuhkan inovasi terus-menerus.

Secara normatif berbeda, syari'ah merupakan hukum Tuhan yang dengan prinsip-prinsipnya mengatur semua aspek hubungan antar manusia, dari ekonomi sampai politik, serta dari kehidupan batin sampai pertalian suami dan istri. Hukum Tuhan ini juga disertai prinsip adanya keyakinan akan Tuhan yang hadir di mana-mana dan Dia juga mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Dalam hal ini, syari'ah adalah jalan menuju sumber kehidupan selama dua puluh empat jam agar manusia senantiasa dekat dan dilindungi pencipta-Nya.<sup>47</sup>

Definisi syari'at yang berbeda dengan yang lain, yaitu syari'at adalah metode dan cara untuk melaksanakan agama (*al-Din*). Syari'at adalah ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berbeda (berubah) menurut perbedaan (pergantian) rasul. Sedangkan *al-Din* adalah dasar pokok yang tetap tidak berbeda (berubah) karena adanya perbedaan (pergantian) rasul.<sup>48</sup> Karena itu, agama yang dibawa oleh para rasul sejak zaman nabi Adam a.s. sampai nabi Muhammad Saw., adalah sama *al-Islam*.

Pandangan tentang syari'at Islam ini jika digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2

## Pendapat Para Tokoh Islam Tentang Syari'at Islam

No.	Tokoh	Definisi Syari'at Islam
-----	-------	-------------------------

<sup>46</sup> Lihat Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1997), khususnya 140-141. menurut Rahman, Syari'ah yang pada awalnya mencakup aturan agama dan ilmu pengetahuan yang sangat komprehensif itu, lambat laun berkembang menjadi ilmu fiqh (hukum) yang lebih berdimensi legal dan rigid. Hal ini sebetulnya tidak seirama dengan konsep legislasi Al-Qur'an yang menekankan pada elastisitas dan semangat moral yang berkesesuaian dengan zaman.

<sup>47</sup> Roger Garaudy, *Hak-hak Asasi dalam Islam: Kelegangan Visi dan Tradisi*, (Oktober-Desember 1993, Jurnal Islamika), No. 2, 105

<sup>48</sup> Usman, *Pemberlakuan Syari'at*, 28

1.	Mahmud Syaltut	Tuntunan mengenai tata peraturan kehidupan praktis.
2.	Abdul Wahab Al-Khallaf	Syari'at adalah titah ( <i>khitab</i> ) Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang muslim, dewasa, berakal sehat baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara.
3.	Yusuf al-Qardhawi	Syari'at Islam beda dengan Undang-undang produk manusia ( <i>Qanun wadh'i</i> ) yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya temporer.
4.	Fazlur Rahman	Syari'at adalah nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna konkret dalam kehidupan yang bertujuan untuk mengarahkan hidup manusia dalam kebaikan.
5.	Abu A'la al-Maududi	Syari'at adalah hukum Tuhan yang mempunyai tujuan untuk menunjukan jalan paling baik bagi manusia dan memberinya cara serta sarana untuk memenuhi kebutuhannya sebaik mungkin, tentu saja yang bermanfaat bagi dirinya.
6.	Roger Garaudy	Syari'at adalah jalan menuju sumber kehidupan selama dua puluh empat jam agar manusia senantiasa dekat dan dilindungi penciptanya
7.	Suparman Usman	Syari'at adalah metode dan cara untuk melaksanakan agama.

8.	UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh	Syari'at adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
9.	Definisi Operasional yang digunakan oleh penulis	Syari'at Islam adalah aturan hidup yang berlaku bagi seluruh umat Islam yang mencakup wilayah hukum ibadah, mu'amalah, ahwal al-shakhshiyyah, al-akhlaq al-karimah dan jinayat sebagaimana yang telah menjadi hukum positif Indonesia.

Adapun peluang dan tantangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah cara pandang penulis dalam melihat fenomena pemberlakuan syari'at Islam dalam bentuk perda di berbagai daerah. Sehingga satu sisi ini adalah sebagai peluang untuk memberlakukan syari'at Islam dalam ranah hukum positif, tetapi juga dilain pihak sebagai tantangan seperti apakah perda syari'at Islam dapat diaplikasikan di masyarakat.

Perkembangan pemikiran tentang definisi syari'at Islam berlanjut pada proses formalisasi serta pemberlakuannya. Formalisasi dalam tulisan ini ialah proses legislasi dari sumber hukum Islam ke dalam hukum nasional melalui proses *taqnin*. Selanjutnya dari proses *taqnin* tersebut, apabila berhasil akan menjadi formalisasi syari'at Islam dalam bentuk peraturan daerah termasuk di Kabupaten Sukabumi.

## 2. Kerangka Pemikiran

Perspektif filsafat hukum Islam, perumusan kerangka pemikiran pemberlakuan syari'at Islam, penulis mengutip metode ijtihad (*istinbath al-ahkam*) yang digunakan para fuqaha pada umumnya. Sebagaimana telah dijelaskan Rachmat Syafe'i, *Ijtihad fi al-istinbath wa al-Tathbiq*, yang mengutip metode perumusan hukum (*istinbath al-ahkam*) Muhammad Ibn Hazm. Ia telah

menjelaskan tiga tahapan perumusan hukum sebagai berikut:<sup>49</sup> *Pertama, Tanqih al-Manat*, yaitu mengungkapkan atau menyeleksi sifat-sifat yang berpengaruh pada hukum (*al-ta'yin wa al-hadfu fi sifat al-hukm*). Fungsi mujtahid di sini adalah untuk menentukan dan membuang sifat-sifat yang berpengaruh pada hukum, di mana setiap mukallaf wajib berijtihad hingga pada tingkat *tanqih* disebabkan keberadaan nash masih bersifat universal dan abstrak, sehingga perlu dicarikan makna operasionalnya agar menjadi *concrete* dan *applicable*. *Kedua, Takhrij al-Manat*, yaitu upaya menggali hukum-hukum syara' dari sumbernya langsung (al-Qur'an dan al-Hadits), baik yang bersifat pasti (*qath'i*) maupun dugaan (*dzanni*), atau lafadh hukum yang bersifat implisit maupun eksplisit. Tahapan kedua ini disebut pula ijtihad qiyasi yakni memindahkan hukum atau menghubungkan *furu'* yang tidak ada nash-nya dengan *furu'* yang ada nash-nya karena kesamaan illat hukum. Pada tahapan kedua ini, metode qiyas menjadi sangat dominan dalam proses penetapan hukum syara'. *Ketiga, Tahqiq al-Manat*, yaitu merumuskan pernyataan-pernyataan yang berupa keputusan-keputusan hukum yang bersifat pasti (*qath'i*) maupun dugaan (*dzanni*) atas kasus-kasus hukum yang sedang dikaji, berikut implementasinya dalam berbagai lapangan hukum. Pada tahapan ini, setiap produk hukum hasil ijtihad hendaknya dapat diimplementasikan sesuai kemauan *nash* dan tuntutan realitas dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, *grand theory* Penegakan Syari'at Islam dalam filsafat hukum Islam berpijak kepada teori kedaulatan Tuhan teori *Kredo* H.A.R Gibb atau teori syahadat menurut Imam Syafi'i. Teori kredo atau teori syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini didasarkan pada al-Qur'an Surat al-Fatihah 1:5.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)

“Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami

<sup>49</sup> Rachmat Syafe'i, *Ijtihad fi al-Istinbat} wa al-Tat}biq* mengutip penjelasan Ibnu Hazm, *Al-ahkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Maktabah al-Misriyyah, t.th).

meminta pertolongan”.<sup>50</sup>

Al-Qur'an Surat al-Baqarah 2:179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.<sup>51</sup>

Teori ini merupakan kelanjutan dari prinsip *tauhidullah* dalam filsafat hukum Islam, prinsip ini menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Swt., maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah dalam al-Qur'an. Teori kredo atau teori syahadat memberikan implikasi yang kuat terhadap pemberlakuan hukum Islam. Teori ini mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadatnya.<sup>52</sup>

Berdasarkan pola-pola penerapan hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat serta ruang lingkup tata kehidupan pasca kemerdekaan republik Indonesia dengan berbagai produk hukum yang dikeluarkan dapat dikatakan teori yang digunakan teori *Receptie a Contrario* (penerapan hukum) yang diperkuat oleh teori negara hukum dan sistem hukum. Teori ini menjadi *middle theory* bagi prinsip-prinsip penerapan syari'at Islam.

Konteks ketatanegaraan, selain sebagai bagian dari umat Islam, masyarakat Indonesia juga sebagai bagian dari warga negara yang memiliki konstitusi atau undang-undang tertinggi yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Maka di sini berlakulah teori Hirarkis piramida Pancasila di mana sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa menjadi pancaran terhadap sila-sila selanjutnya dan sila-sila yang lain tidak boleh bertentangan dengan sila pertama.<sup>53</sup> Selanjutnya,

<sup>50</sup> Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 6.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 44.

<sup>52</sup> Teori ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhidullah dalam filsafat hukum Islam, prinsip ini menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah maka ia harus tunduk terhadap apa yang diperintahkan Allah Swt. Lihat, Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM Unisba, 1995), 133.

<sup>53</sup> Menurut Notonegoro Seperti dikutip Sahrul Anwar dalam kumpulan makalah kuliah "*Teori Hukum, Suatu Perbandingan*" disusun pada Januari 2009, 99

diperlukan suatu metode bagi aplikasi penerapan syari'at Islam dalam praktik hukum ketatanegaraan. Dalam *applicative theory*, penulis mengadopsi teori perubahan hukum.

Secara *de facto*, telah terjadi simplifikasi terhadap substansi hukum Islam, yaitu setiap kali bicara hukum Islam di Indonesia ruang lingkupnya seakan-akan terbatas pada masalah perkawinan, perceraian, kewarisan, dan perwakafan (*al-ahwal al-shakhshiyyah*). Padahal dalam sejarah ditemukan sebuah teori *Receptie in Complexu* artinya hukum Islam diterima secara menyeluruh, ia berfungsi sebagai keyakinan dan juga sebagai panduan amaliah praktis. Hukum Islam di Indonesia telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam.<sup>54</sup>

Teori perubahan hukum yang penulis adopsi memuat beberapa hal: (1) Hukum sebagai *a tool of social engineering* (rekayasa sosial). Hukum sebagai rekayasa kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat, maka hal ini nampak dalam sistem bernegara yang berdasarkan pola liberal, di mana kelompok-kelompok yang berkoalisi atau yang menang (mayoritas), merekayasa hukum tersebut. Dalam hal ini, kepentingan golongan lebih dominan ketimbang kepentingan masyarakat, tidak perlu dijelaskan lagi.<sup>55</sup> Dalam hal hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat, maka hukum benar-benar dipakai untuk merealisasi kepentingan masyarakat dan bangsa, tanpa memperhatikan golongan-golongan ekonomi, status, asal-usul, agama, suku bangsa, dan sebagainya.<sup>56</sup> Hukum bukan sekedar sebagai pagar pembatas, melainkan juga sebagai pegangan atau panduan bersama, supaya perilaku masing-masing pribadi atau kelompok yang saling berjumpa bisa sesuai dengan kepentingan bersama.<sup>57</sup> Di sini kepentingan dan kesejahteraan bersama merupakan *common good* dari masyarakat yang

---

<sup>54</sup> Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2001), 55.

<sup>55</sup> Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Cet. I, 131

<sup>56</sup> Harjono, *Indonesia Kita*., 132

<sup>57</sup> Francisco Budi Hardiman, *Demokratisasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 365.



menjungjung tinggi nilai keadilan.<sup>58</sup> (2) Hukum Sebagai Instrumen Pembangunan, dalam hal ini fungsi hukum tidak lagi hanya untuk menjaga “ketertiban”, tetapi harus dapat berfungsi sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sarana penyalur arah kegiatan kemajuan di bidang ekonomi dalam upaya mencapai masyarakat makmur yang berkeadilan.<sup>59</sup>

Analisis fungsional, fungsi hukum sebagai instrumen dalam *social control* atau *social engineering* tidak hanya berupa fungsi manifes (stabilisasi institusi-institusi lain dalam masyarakat), tetapi juga fungsi laten (destabilisasi institusi-institusi lain dalam masyarakat), maka perlu adanya fungsi penegakan hukum (*law enforcement*) agar produk hukum tersebut memberikan fungsi stabilisasi bagi institusi-institusi agama (kepentingan ibadah) dan penerapan hukum dalam masyarakat melalui perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan legislasi hukum (*taqin al-Ahkam*).

Adapun teori *mashlahah mursalah*, dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum, bila: 1) masalah itu bersifat esensial atas dasar penelitian, observasi serta melalui analisis dan pembahasan yang mendalam, sehingga penetapan hukum terhadap masalah tersebut benar-benar memberi manfaat dan menghindarkan madarat; 2) masalah itu bersifat umum, bukan kepentingan perseorangan, tetapi bermanfaat untuk orang banyak; 3) masalah itu tidak bertentangan dengan nash dan memenuhi kepentingan hidup manusia serta menghindarkan dari kesulitan.

Membuat ketetapan hukum bagi suatu kasus yang didasarkan *Mashlahah Mursalah* dalam praktik ijtihad, merupakan suatu metode yang memberi kesempatan luas untuk mengembangkan hukum di bidang muamalah. Sebab, nash-nash yang berkenaan bidang muamalah hanya bersifat global atau prinsip-prinsipnya saja, dan jumlahnya pun tidak banyak, sedangkan pola hidup manusia cenderung berubah dan bersifat kompleks. Oleh karena itu, banyak produk hukum yang bisa dilahirkan dari metode istishlah ini. Seperti peraturan yang mencegah

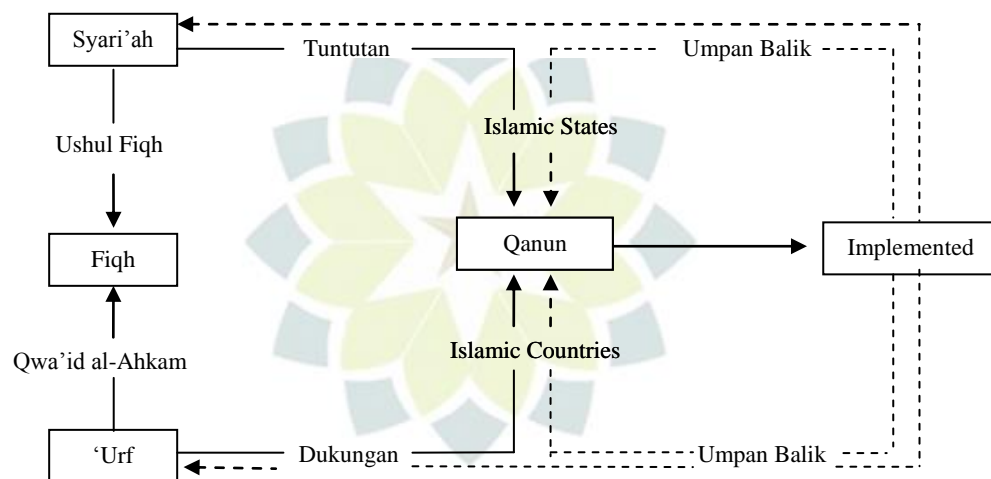
---

<sup>58</sup> Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), 232.

<sup>59</sup> Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, (Bandung:

peronggrongan agama, peraturan-peraturan yang memelihara hak pemilikan harta, keturunan (hak-hak anak), perundang-undangan di bidang kenegaraan, hubungan antarnegara dan bangsa, ekonomi dan perdagangan, pertanian, industri, lingkungan hidup keamanan dan ketertiban, lalu lintas, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pengelolaan zakat, dan sebagainya. (Suyuthi Pulungan, 1995: 33, Abdul Wahab Khalaf, 86)

Kerangka pemikiran ini secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1.  
Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka legislasi atau (*taqnin*) tidak hanya didasarkan pada tuntutan syari'ah akan tetapi bisa juga didasarkan dukungan 'urf. Dengan kata lain, *qanun* tidak hanya terikat pada kehendak *Ilahi* tetapi juga terkait dengan kepentingan sosiologis. Implementasi *qanun* harus memenuhi dimensi yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat diajukan jawaban-sementara terkait dengan pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada bagian sebelumnya:

1. Legislasi penerapan hukum Islam menjadi peraturan daerah Kabupaten Sukabumi tentang Penegakan Syari'at Islam merupakan legislasi yang lebih didasarkan pada pemahaman positifistik terhadap hukum. Transformasi

hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak memiliki hubungan dengan perjuangan untuk menuju negara Islam atau Islam sebagai dasar negara. Tetapi sebaliknya, legislasi hukum Islam menjadi perundang-undangan negara memiliki kontribusi positif dalam memperkuat daya rekat umat Islam terhadap komitmen negara kebangsaan (*nation state*) karena syari'at bisa berjalan seiring dan kompatibel dengan Pancasila dan UUD 1945.

2. Diterbitkannya Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2008 Tentang Standar Program Pengembangan Diri Bidang Pembiasaan Akhlak Mulia di Sekolah dan Madrasah. Peraturan Bupati ini mengandung nilai-nilai hukum Islam yang ditransformasikan ke dalam hukum positif. Upaya Penegakan Syari'at Islam di Kabupaten Sukabumi dilaksanakan merupakan penjabaran dari *Fiqh al-Akbar/Syari'ah*, di antara bagian dari syari'ah adalah "*khuluqiyah*". Jadi pelaksanaan syari'at Islam di Kabupaten Sukabumi adalah melalui gerakan akhlak (moral). Maka dengan adanya legislasi transformasi hukum Islam melalui peraturan daerah Kabupaten Sukabumi tentang syari'at Islam terasa akan lebih efektif dalam penerapan hukum Islam di masyarakat dalam pengimplementasiannya.